



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 5 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN

UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **HASAN ABDULLAH SANYATA**
2. Jabatan : **KEPALA BALAI BESAR**
3. NHK : **630777**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 1.108.074.000**

1. Tanah Seluas 2140 m2 di KAB / KOTA KLATEN, WARISAN Rp. 361.660.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 72 m2/41 m2 di KAB / KOTA KOTA BOGOR , HASIL SENDIRI Rp. 514.080.000
3. Tanah Seluas 217 m2 di KAB / KOTA KLATEN, WARISAN Rp. 81.592.000
4. Tanah Seluas 667 m2 di KAB / KOTA KLATEN, WARISAN Rp. 150.742.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 28.000.000**

1. MOTOR, HONDA VARIO 125 Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 14.000.000
2. MOTOR, HONDA SUPRA X 125 Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 6.400.000
3. MOTOR, HONDA SUPRA 125 Tahun 2002, HASIL SENDIRI Rp. 2.300.000
4. MOTOR, HONDA GL PRO Tahun 1997, HASIL SENDIRI Rp. 3.900.000
5. MOTOR, HONDA STAR 86 CC Tahun 1993, HASIL SENDIRI Rp. 1.400.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 245.473.000**



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	272.250.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.653.797.000
III. HUTANG	Rp.	101.945.442
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.551.851.558

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 14 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN

UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **CYNTHIA DEVI IRAWATI**
2. Jabatan : **PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR**
3. NHK : **414047**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 830.994.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/36 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 145.994.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 204 m2/38 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 315.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 110 m2/45 m2 di KAB / KOTA DELI SERDANG, LAINNYA Rp. 90.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 110 m2/45 m2 di KAB / KOTA DELI SERDANG, LAINNYA Rp. 90.000.000
5. Tanah Seluas 1.246 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 190.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 56.000.000**

1. MOBIL, NISSAN GRAND LIVINA/1500XV Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 55.000.000
2. MOTOR, HONDA NF 100 SL Tahun 2006, HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. ----**

D. SURAT BERHARGA **Rp. ----**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp. 194.638.233**

F. HARTA LAINNYA **Rp. ----**

Sub Total **Rp. 1.081.632.233**



III. HUTANG

Rp. 130.325.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 951.307.233

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 15 Februari 2025/Periodik - 2024)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : M. SYAEFURROSAD
2. Jabatan : PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
3. NHK : 443355

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	750.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 104 m2/107 m2 di BOGOR, HASIL SENDIRI	Rp.	750.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	115.000.000
1. MOBIL, TOYOTA KIJANG INNOVA Tahun 2010, HASIL SENDIRI	Rp.	115.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	18.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	1.421.824
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	884.421.824
III. HUTANG	Rp.	60.800.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	823.621.824

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 15 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN

UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **EMI LIANA**
2. Jabatan : **BENDAHARA PENERIMA**
3. NHK : **113421**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 370.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 1064 m2/210 m2 di KAB / KOTA
CIANJUR, WARISAN Rp. 250.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 80 m2/80 m2 di KAB / KOTA BOGOR,
HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 55.000.000**

1. MOBIL, TOYOTA KIJANG MINIBUS Tahun 1994, LAINNYA Rp.
55.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 3.000.000**

D. SURAT BERHARGA **Rp. ----**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp. 458.368**

F. HARTA LAINNYA **Rp. ----**

Sub Total **Rp. 428.458.368**

III. HUTANG **Rp. 405.840.000**

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) **Rp. 22.618.368**

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan



Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 15 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ANDI
2. Jabatan : BENDAHARA PENGELUARAN
3. NHK : 114085

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	200.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 100 m2/70 m2 di KAB / KOTA BOGOR, WARISAN Rp. 200.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	8.000.000
1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	12.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	799.055
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	220.799.055

III. HUTANG **Rp.** **200.000.000**

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) **Rp.** **20.799.055**

Catatan:

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.